

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian dan pengumpulan data, bisa disimpulkan bahwa penyusunan dan evaluasi RKPD Tahun 2025 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut beberapa hal penting yang bisa diambil dari hasil penelitian ini:

Penyusunan RKPD sudah mengikuti prosedur yang jelas dan terstruktur. Prosesnya dimulai dari pembentukan tim, pengumpulan data, penyusunan rancangan awal, sampai akhirnya disahkan menjadi dokumen resmi lewat Peraturan Gubernur. Semua ini mengacu pada peraturan seperti UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2004, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Penggunaan teknologi, khususnya aplikasi e-Planning, sangat membantu proses perencanaan. Dengan sistem ini, pengumpulan data dan pengawasan menjadi lebih cepat dan transparan. Ini juga menandakan bahwa Bappeda mulai bergerak ke arah digitalisasi perencanaan yang lebih efisien.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara rutin dan bertahap. Setiap perangkat daerah menyampaikan laporan capaian program/kegiatannya. Dari situlah Bappeda bisa menilai apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya.

Proses penyusunan RKPD bersifat terbuka dan melibatkan banyak pihak. Ada ruang bagi masyarakat, DPRD, dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan masukan, terutama lewat forum Musrenbang, reses, dan konsultasi publik.

Masih ada beberapa tantangan di lapangan, seperti keterlambatan input data dari perangkat daerah, ketidaksesuaian data antar dokumen, dan keterbatasan SDM di bidang perencanaan. Tapi secara umum, Bappeda sudah berusaha mencari solusi lewat pelatihan, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran agar proses penyusunan dan evaluasi RKPD ke depan bisa berjalan lebih optimal:

1. Koordinasi antar perangkat daerah perlu terus diperkuat. Tujuannya agar tidak ada keterlambatan pengumpulan data dan semua program bisa sinkron dengan arah pembangunan daerah.
2. Peningkatan kapasitas SDM sangat penting. Pegawai yang terlibat dalam perencanaan perlu terus dibekali pengetahuan, terutama dalam hal teknis seperti penggunaan aplikasi e-Planning dan penyusunan indikator kinerja.
3. Kualitas data harus jadi perhatian serius. Data yang digunakan dalam perencanaan sebaiknya benar-benar akurat dan diperbarui secara rutin, karena keputusan kebijakan sangat bergantung pada data yang tersedia

4. Evaluasi sebaiknya tidak hanya fokus pada jumlah kegiatan yang selesai, tapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat. Jadi, bukan cuma soal output, tapi juga outcome-nya.
5. Partisipasi masyarakat dan DPRD sebaiknya tidak hanya sebatas formalitas. Bappeda bisa lebih aktif membuka ruang diskusi yang terbuka dan dua arah, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

